

**ANALISIS FIQIH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG
PENYELENGGARAAN NEGARA BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN
NEPOTISME DI KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

SKRIPSI

Oleh

Nur Qaiyum Budiono

NIM. C04219035



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Pogram Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Qaiyum Budiono

NIM : C04219035

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul : Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari KKN di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juni 2023

Yang menyatakan,



Nur Qaiyum Budino

NIM. C04219035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Qaiyum Budino

NIM : C042129035

Judul : Analisis Fiqh Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara bebas dari KKN di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juni 2023
Pembimbing,



Dr. Achmad Yasin, Drs., M.Ag.
NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Qaiyum Budiono

Nim : C04219035

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Rabu, Tanggal 14 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Achmad Yasin, Drs., M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji II

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji III

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Penguji IV

Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 14 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,

Dr. H. Musata'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Qaiyum Budiono
NIM : C04219035
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : azumbudiono19@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS FIKIH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG
PENYELENGGARAAN NEGARA BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN
NEPOTISME DI KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 April 2024

Penulis

(Nur Qaiyum Budiono)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang mana dalam Undang-Undang pasal 1 menyatakan bahwa penyelenggaraan Negara yang bersih adalah penyelenggaraan Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan yang tercela lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang relevansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme di Kecamatan Babat. Kecamatan Babat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 kurang maksimal dalam sosialisasi terhadap masyarakat, oleh karena itu masyarakat kurang sadar terhadap peraturan Hukum yang berlaku. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2021 dan relevansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2021 menurut *fiqh siyasah dusturiyah*.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *field research* dan pendekatan *deskriptif analitis*. Teknik analisis data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dan menjadi data yang konkrit mengenai implementasi dan relevansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan menggunakan teori hukum Islam, *siyasah dusturiyah*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, kurangnya sosialisasi Pemerintah Kecamatan Babat terhadap implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 1999, sehingga masyarakat minim pengetahuan tentang hukum. *Kedua*, ditinjau dari *siyasah dusturiyah*, relevansi penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme pada Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan teori *fiqh dusturiyah*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, diharapkan kepada petugas Kantor Kecamatan Babat agar lebih mensosialisasikan tentang peraturan Hukum dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya Hukum. *Kedua*, untuk memberikan efek jera kepada penyelenggara Negara yang lalai dan sengaja melakukan tindak pidana korupsi, kepala instansi harus dapat memberikan sanksi administrasi yang tegas.

DAFTAR ISI

SAMPUL DAL AM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	2
I. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TATA KELOLA PEMERINTAHAN, KEUANGAN DAN ANTI KKN DALAM HUKUM POSITIF	22
A. Fiqih Siyasah	22
1. Pengertian Fiqih Siyasah.....	22
2. Sumber Hukum dalam <i>fiqh siyasah</i>	23
3. Siyasah Dusturiyah	24
5. Prinsip Pengolahan Keuangan dalam Islam.....	28
B. Korupsi, kolusi dan nepotisme	32
1. Pengertian korupsi, kolusi dan nepotisme dalam prespektif Islam.....	32
2. Factor penyebab korupsi	35
3. Prinsip dan Asas Pengolahan Sumber Keuangan.....	36
C. Profil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999	41

DAFTAR PUSTAKA

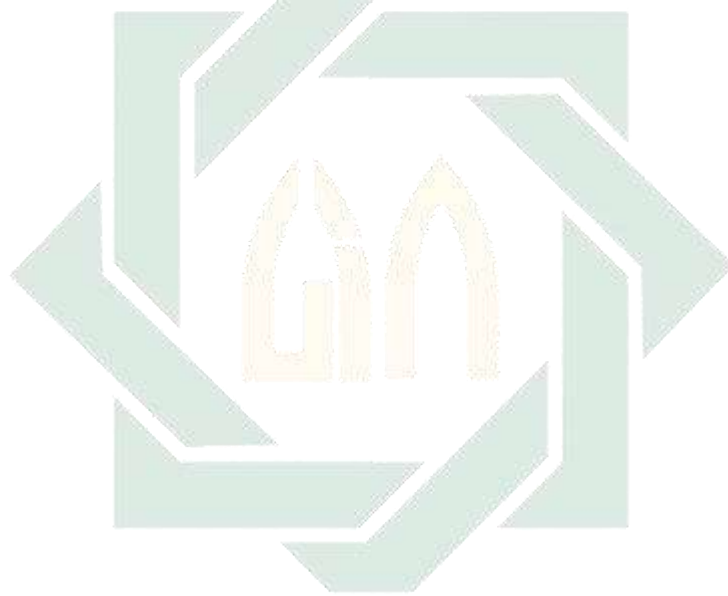
- Asyriah. *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih*, 2010.
- Djazuli, A. “Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah,” 2013, 47.
- Farhan Nazhiri, Ahmad. “IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRASI LAPORAN HASIL KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA TERHADAP TERCIPTANYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBASDARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih,” 2019, 99.
- Hamzah, Andi. “No Title.” *Perbandingan Pemabrantasan Korupsi Di Berbagai Negara*, 2005, 1.
- Hartanti, Evi. “Tindak Pidana Korupsi,” 2005.
- . “Tindak Pidana Korupsi,” 2014, 9.
- Hasanah, Zainatun, M. Uhaib As’ad, and Beni Akhmad. “Program Kerja Sebagai Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang.” *Jurnal Mahasiswa*, 2021, 1–13.
- Iqbal, Muhammad. “Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam,” 2014, 177.
- . “Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,” 2014, 117.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Mahfud MD, Moh. “Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi,” 2010, 45.
- Manan, Abdul. “Aspek-Aspek Pengubah Hukum.” *Cet Ke-5*, 2018, 2.
- Mujahid. *Nepotisme Bahaya Dunia Akhirat*, 2010.
- Mujieb, Abdul. “Kamus Istilah Fiqih,” 1994, 294.
- Rahmatullah, Dimas, and Muhammad Zaini. “Peran Kecamatan Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Study Kasus Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 2020.” *Dinamika :Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 8, no. 2 (2021): 346–64.
- Ridwan. “Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan,” 2007, 30.
- Rofitasari, Syelladita. “Implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah.” *Jurnal Hukum Islam* 24, no. 28 (2021): 14–20.

<http://repository.uin-suska.ac.id/54769/>.

Rosita, Ino. "Analisis Arah Perkembangan Wilayah Di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan." *Analisis Arah Perkembangan Wilayah Di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan*, 2017, 1–9.

Saebani, Beni Ahmad. "Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin," n.d., 22.

Salim, Abdul Muin. "Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an," 2002, 50.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A